

# KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN DAERAH

Benta Palantama Putra

*STIEBI PRANA PUTRA Lubuk Linggau*

---

## Abstract

This study aimed to analyze the financial performance of the district or the city before and after the expansion in South Sumatera. The population in this study is the entire district of South Sumatera. This type of research used in this research is a quantitative descriptive. The sampling technique used was purposive sample and selected 6 parent districts that experienced split area. Data analysis tools in this test using analysis of the ratio, descriptive statistics, data normality test, and t test (paired t-test).

The results of this research show that there are differences in financial performance of district governments before and after expansion in South Sumatera Province measured from the ratio of fiscal decentralization due to Total Income Original Area has increased after expansion, there are differences in financial performance of district governments before and after expansion in South Sumatera Province is measured from the ratio of capital expenditure compatibility due to capital expenditure (development) has increased after expansion, there is no difference in financial performance of district government before and after expansion in South Sumatera Province is measured from the ratio of Income Original Area growth due to the Income Original Area not changed, there was no difference in financial performance of district government before and after expansion in South Sumatera Province measured from ratio of regional finance dependence due to transfer revenue with total fund the regional apparatus did not change

Keywords: Financial Performance, Desentralisasi Fiscal, Compatibility Capital Expense, Growth of Income,

---

## 1. Pendahuluan

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah yang sekarang disebut pemekaran daerah merupakan suatu kebijakan yang memiliki tujuan mulia untuk mendukung pemerataan pembangunan yang dibutuhkan daerah. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan yang meliputi berbagai aspek termasuk salah satunya adalah yang berhubungan dengan aspek finansial/keuangan. Hal ini sesuai dengan tujuan otonomi daerah yaitu agar tidak terjadi pemusatan di dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga jalan pemerintah serta pembangunan berjalan lancar.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, kinerja daerah terukur melalui kemampuan daerah mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Kaho (1997) menyatakan bahwa salah satu kriteria yang penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah self supporting dalam bidang keuangan. Hal ini berarti bahwa keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.

Pemekaran daerah atau wilayah di Provinsi Sumatera Selatan telah terjadi beberapa kali khususnya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) kabupaten/kota. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Hendri Zainudin anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Selatan bahwa terdapat 17 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) menjadi solusi terbaik untuk memajukan daerah. (<http://palembang.tribunnews.com/2016/03/21/ini-alasan-senator-hendri-rekomendasikan-pemekaran-6-wilayah-di-sumsel>), seperti yang digambarkan dalam ringkasan berikut:

- Kota Lubuklinggau merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 21 Juni 2001.

- Kota Pagar Alam merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat pada tanggal 21 Juni 2001.
- Kota Prabumulih merupakan pemekaran dari Kabupaten Muara Enim pada tanggal 21 Juni 2001.
- Kabupaten Banyuasin merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 2 Juni 2002.
- Kabupaten Ogan Ilir merupakan pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 18 Desember 2003.
- Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Tanggal 18 Desember 2003.
- Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal 16 Januari 2004.
- Kabupaten Empat Lawang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat pada tanggal 20 April 2007.
- Kabupaten Panukal Alab Lematang Ilir (PALI) merupakan pemekaran dari Kabupaten Muara Enim pada tanggal 11 Januari 2013.
- Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 11 Juni 2013.

Berdasarkan fenomena di atas pemekaran daerah di Provinsi Sumatera Selatan kiranya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mulanya ditunjukkan oleh meningkatnya kinerja keuangan dari pemerintah daerah pemekaran tersebut. Berbagai penelitian menemukan hasil yang beragam mengenai hasil perbandingan tentang kinerja keuangan sebelum dan setelah pemekaran yang dialami oleh pemerintah daerah yang mengalami pemekaran. Menurut Sucandrawati (2016) kinerja keuangan ini menjadi tolak ukur keberhasilan atas kebijakan pemekaran wilayah yang diambil oleh pemerintah daerah. Untuk melihat perkembangan suatu daerah pemekaran atau daerah otonomi baru, diperlukan adanya perbandingan kinerja daerah tersebut sebelum dan setelah pemekaran. Dari hal itu akan terlihat apakah terjadi perubahan kemajuan yang signifikan pada suatu daerah setelah dimekarkan. Menurut Bappenas (2008) Pendekatan seperti ini dapat dianggap kurang tepat bila tidak ada pembandingan yang setara. Namun perbandingan dapat dilakukan antara daerah induk dan daerah otonomi baru sehingga dapat dilihat bagaimana dampak yang terjadi di kedua daerah tersebut setelah pemekaran. Perbandingan ini juga dilakukan terhadap perkembangan rata-rata daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi yang sama. Hal ini dimaksud untuk melihat secara umum kondisi daerah otonomi baru, daerah induk, dan daerah sekitarnya.

Penelitian Wulansari (2018) dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Asahan sebelum dan sesudah otonomi daerah belum dapat dikatakan baik dikarenakan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat masih tinggi, belum tercapainya target penerimaan PAD, sebelum otonomi daerah, terpusatnya dana APBD pada belanja rutin dibandingkan belanja pembangunan. Hasil penelitian Imelda (2015) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan rasio desentralisasi fiskal, kamandirian, kemampuan pembiayaan, efisiensi dan efektifitas, ketergantungan dan kontribusi BUMD dalam pencapaian kinerja keuangan sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan teori yang sama tetapi waktu yang berbeda dengan peneliti sebelumnya. Dengan menganalisa kinerja keuangan sebelum dan setelah pemekaran Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, apakah kinerja pemerintah sebelum pemekaran dan setelah pemekaran sudah mempercepat pendapatan asli daerah dan mengurangi terhadap pemerintah pusat sebaliknya

## **2. Tinjauan Pustaka**

### *2.1. Otonomi Daerah*

Sujarweni (2015 : 230) menyatakan “asal kata otonomi dari bahasa Yunani, *autos* yang artinya sendiri dan *nomos* yang artinya Undang-Undang atau aturan. Maka otonomi bisa diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian kewenangan ini didasarkan kepada azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah ini tentunya diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan juga didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Dengan otonomi daerah tersebut, menurut Mariun dalam Sujarweni (2015 : 230) bahwa dengan kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah yang mungkin untuk membuat inisiatif sendiri, mengelolah dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat.

Menurut Mulatsih (2014) kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah tetapi perlu juga diwujudkan atas dasar prakarsa dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah sendiri sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah itu. Dalam kultur masyarakat Indonesia yang paternalistik, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan upaya sadar untuk membangun keprakarsaan dan kemandirian daerah sendiri..

## *2.2. Pengertian Kinerja*

Kinerja berasal dari kata Job Performance atau actual Performance (Prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja seorang pegawai selama periode tertentu yang dinilai dengan serangkaian tolak ukur yang berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta kriteria yang ditetapkan.

Kinerja adalah penampilan hasil karya personel baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja personel. Deskripsi dari kinerja menyangkut 3 (tiga) komponen penting, yakni tujuan, ukuran dan penilaian. Penentuan tujuan dari setiap unit organisasi merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja. Tujuan ini memberikan arah dan mempengaruhi bagaimana seharusnya perilaku kerja yang diharapkan organisasi terhadap setiap personel. Tujuan ini akan memberikan arah dan mempengaruhi bagaimana seharusnya perilaku kerja yang diharapkan organisasi terhadap setiap personel. Walaupun demikian, penentuan tujuan saja tidaklah cukup, sebab itu dibutuhkan ukuran apakah seseorang personel telah mencapai kinerja yang diharapkan.

## *2.3. Pengertian Analisis Rasio Keuangan*

Analisis Rasio Keuangan adalah suatu metode untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Menurut Roos (2004:78) Rasio Keuangan adalah “Hubungan yang dihitung dan informasi keuangan suatu perusahaan dan digunakan untuk tujuan perbandingan”. Sedangkan menurut Jumingan (2006:242) “Analisis Rasio Keuangan merupakan analisis dengan membandingkan satu pos laporan dengan dengan pos laporan keuangan lainnya, baik secara individu maupun bersama-sama guna mengetahui hubungan diantara pos tertentu, baik dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi”. Rasio menggambarkan suatu hubungan dan perbandingan antara jumlah tertentu dalam satu pos laporan keuangan dengan jumlah yang lain pada pos laporan keuangan yang lain. Dengan menggunakan metode analisis seperti berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Dengan rasio keuangan pula dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan, Realisasi Anggaran secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.

Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan rasio kinerja keuangan daerah terhadap APBD. Beberapa rasio yang digunakan adalah

Rasio Desentralisasi, Rasio Keserasian Belanja Modal, Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah..

Menurut Mahmudi (2010) derajat desentralisasi dilihat dari perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Menurut Halim (2007) rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Menurut Halim (2007) rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian

Menurut Halim (2007) ketergantungan keuangan daerah semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Menurut Mahmudi (2010) dalam pelaksanaannya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan bisa menggali potensi yang ada di daerah tersebut agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat bisa berkurang..

#### *2.4. Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran dilihat dari Aspek Desentralisasi Fiskal*

UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, penyelenggaraan desentralisasi merupakan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom, dengan bagian urusan pemerintah yang bersifat concurrent yang artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan pembangunan kewenangan yang concurrent secara proporsional antar pemerintah, daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota, maka disusunlah kriteria yang meliputi, kriteria eksternalistis, kriteria akuntabilitas, dan kriteria efisiensi.

H1 : Terdapat perbedaan rasio desentralisasi fiskal sebelum dan setelah pemekaran daerah .

#### *2.5. Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran dari Aspek Keserasian Belanja Modal*

Rasio keserasian belanja modal menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal. Belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan tidak ada yang memungkiri bahwa belanja modal sangat penting dalam aktivitas ekonomi suatu negara termasuk di daerah khususnya daerah pemekaran. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa daya saing suatu negara termasuk pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur dalam negara tersebut. Oleh karena itu, bagaimanapun belanja modal suatu daerah pemekaran akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

H2 : Terdapat perbedaan rasio keserasian belanja modal sebelum dan setelah pemekaran daerah

#### *2.6. Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran dilihat dari Aspek Pertumbuhan PAD*

Halim (2007:157) menyatakan rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

H3 : Terdapat perbedaan pertumbuhan PAD sebelum dan setelah pemekaran.

## 2.7. Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah dilihat dari Aspek Ketergantungan Keuangan Daerah

Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan bisa menggali potensi yang ada di daerah tersebut agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat semakin berkurang. Kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

H4 : Terdapat perbedaan ketergantungan keuangan sebelum dan setelah pemekaran daerah..

## 3. Metode Penelitian

### 3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

- Kinerja Keuangan Daerah adalah kemampuan kerja manajemen keuangan dalam mencapai prestasi kerjanya.
- rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah ini menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah.
- Rasio keserasian belanja modal adalah rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal.
- Rasio pertumbuhan PAD adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negative
- Rasio ketergantungan keuangan daerah yaitu rasio yang mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, yang diukur dengan rasio antara pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah.

### 3.2. Metode Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah yang berjumlah 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan objek penelitan berupa laporan realisasi anggaran yang terdaftar di Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pusat (DJPKPD).

Menurut Sugiyono (2012:81) "sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Berdasarkan pengertian tersebut pemilihan sampel penelitian ini berdasarkan pada purposive sampling. Purposive sampling dalam penelitian ini yang digunakan adalah kabupaten daerah induk atau yang melakukan pemekaran daerah yang berjumlah 6 (enam) Kabupten Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Khusus untuk Kabupaten Lahat, Muara Enim, Musi Rawas dan Ogan Komering Ulu telah melakukan dua kali pemekaran, dan yang telah menyajikan laporan realisasi anggaran yang terdaftar di dirjen perimbangan keuangan pemerintah daerah..

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.1. Deskriptif Statistik

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maximum, rata-rata (mean), dan standar deviasi yang dihasilkan dari

variabel penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel-variabel penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai maksimum Desentralisasi Fiskal Sebelum pemekaran terbesar 7.19 untuk Kabupaten Muara Enim Tahun 2012, nilai minimum 1.21 untuk Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2001, nilai mean (rata-rata) 4.3096 lebih besar dari nilai standar deviasi 1.38810. Desentralisasi Fiskal Setelah pemekaran diketahui nilai maksimum (terbesar) 10.50 terdapat pada Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014, nilai minimum (terendah) 1.55 terdapat pada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002, nilai mean (rata-rata) 5.1132 lebih besar dari nilai standar deviasi 2.16170.

Keserasian Belanja Modal sebelum pemekaran diketahui nilai maksimum (terbesar) 42.47 terdapat pada Kabupaten Muara Enim Tahun 2013, nilai minimum (terkecil) 7.32 terdapat pada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2004, nilai mean (rata-rata) 19.8443 lebih besar dari nilai standar deviasi 11.30972. sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel ukuran rasio keserasian belanja modal sebelum ini tidak bervariasi. Selanjutnya Keserasian Belanja Modal setelah pemekaran diketahui nilai maksimum (tertinggi) 51.65 terdapat pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007, nilai minimum (terendah) 12.52 terdapat pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2005, nilai mean (rata-rata) 27.8864 lebih besar dari nilai standar deviasi 10.56590.

Pertumbuhan PAD sebelum pemekaran dapat diketahui nilai maksimum (tebesar) 518.93 terdapat pada Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011, nilai minimum (terkecil) -30.13 terdapat pada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2003, nilai mean (rata-rata) 65.2168 lebih kecil dari nilai standar deviasi 116.94603. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio pertumbuhan PAD sebelum ini tidak bervariasi. Pertumbuhan PAD setelah pemekaran diketahui nilai maksimum (terbesar) 59.42 terdapat pada Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014, nilai minimum (terkecil) -60.25 terdapat pada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2004, nilai mean (rata-rata) 11.6125 lebih kecil dari nilai standar deviasi 25.96499.

Ketertgantungan Keuangan Daerah sebelum pemekaran dapat diketahui nilai maksimum (tertinggi) 97.54 terdapat pada Kabupaten Lahat Tahun 2001, nilai minimum (terkecil) 74.38 terdapat pada Kabupaten Muara Enim 2002, nilai mean (rata-rata) 90.4039 lebih besar dari nilai standar deviasi 5.30195. Sehingga menunjukkan bahwa rasio ketertgantungan keuangan daerah ini tidak bervariasi. Ketertgantungan Keuangan Daerah setelah pemekaran diketahui nilai maksimum (terbesar) 95.50 terdapat pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007, nilai minimum (terkecil) 69.07 terdapat pada Kabupaten Musi Rawas Tahun 2002, nilai mean (rata-rata) 87.5579 lebih besar dari nilai standar deviasi 7.17814.

Table 1. Deskriptif Statistik

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DFSB	1.21	7.19	4.3096	1.38810
DFST	1.55	10.50	5.1132	2.16170
KBMSB	7.32	42.47	19.8443	11.30972
KBMST	12.52	51.65	27.8864	10.56590
PPADSB	-30.13	518.93	65.2168	116.94603
PPADST	-60.25	59.42	11.6125	25.96499
KKDSB	74.38	97.54	90.4039	5.30195
KKDST	69.07	95.50	87.5579	7.17814

#### 4.2. Hasil Uji Beda Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan hasil uji t (tabel 2) disimpulkan bahwa secara statistik terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten sebelum dan setelah pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan diukur dari rasio desentralisasi fiskal. Dengan demikian pemekaran daerah telah memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah induk dilihat dari aspek desentralisasi fiskal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Meilinda (2010) yang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal setelah berlakunya pemekaran daerah lebih baik dari pada sebelum pemekaran daerah. Rendahnya desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan sebelum pemekaran daerah disebabkan bukan hanya karena kabupaten belum mampu mengintensifkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, tetapi juga ada beberapa sumber PAD yang beralih ke daerah pemekaran ( daerah otonom baru). Hal ini mengakibatkan rendahnya PAD yang menyebabkan proporsi PAD terhadap pendapatan daerah juga rendah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan potensi keuangan lokal, khususnya Pendapatan Asli Daerah.

Table 2. Hasil Uji Beda

Variabel	Rata-rata Beda	Nilai t	Sig
DFSB- DFST	-.80357	-2.970	.006
KBMSB-KBMST	-2.50487E1	-12.609	.000
PPADSB-PPADST	-8.5164	-1.539	.138
KKDSB-KKDST	2.84607	1.968	.059

#### 4.3. Hasil Uji Beda Aspek Keserasian Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t disimpulkan secara statistik terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten sebelum dan setelah pemekaran diukur dari rasio keserasian belanja modal. Dengan demikian pemekaran daerah memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah induk dilihat dari aspek keserasian belanja modal. Adanya perbedaan kinerja keuangan pada daerah induk setelah pemekaran disebabkan karena realisasi anggaran untuk belanja modal mengalami perubahan yang signifikan meskipun daerah tersebut dimekarkan. Menurut Susanti (2009) semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan pada belanja pelayanan publik (belanja modal) maka dana yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin besar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang Anggraeni (2015) menguji pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

#### 4.4. Hasil Uji Beda Aspek Pertumbuhan PAD

Berdasarkan hasil uji t (t-paired) disimpulkan secara statistik tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten sebelum dan setelah pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan diukur dari rasio pertumbuhan PAD. Dengan demikian pemekaran daerah tidak memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah induk dilihat dari aspek pertumbuhan PAD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mengkuningtyas (2015) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum dan setelah pemekaran di Indonesia.

#### 4.5. Hasil Uji Beda Aspek Ketergantungan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji t disimpulkan secara statistik tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten sebelum dan setelah pemekaran di provinsi Sumatera Selatan yang diukur dari rasio ketergantungan keuangan daerah. Dengan demikian pemekaran daerah tidak memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah induk dilihat dari aspek ketergantungan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mianti (2014) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah se-Provinsi Bengkulu selama periode sepuluh tahun terakhir diukur dari rasio ketergantungan keuangan daerah.

## 5. Kesimpulan

- Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten sebelum dan setelah pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan diukur dari rasio desentralisasi fiskal dikarenakan Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan setelah pemekaran.
- Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten sebelum dan setelah pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan diukur dari rasio keserasian belanja modal dikarenakan belanja modal (pembangunan) mengalami peningkatan setelah pemekaran.
- Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten sebelum dan setelah pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan diukur dari rasio pertumbuhan PAD dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mengalami perubahan.
- Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten sebelum dan setelah pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan diukur dari rasio ketergantungan keuangan daerah dikarenakan pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah tidak mengalami perubahan :

## Daftar Pustaka

- Djalil, Rizal. 2014. Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi. Jakarta: RMBOOKS PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Erina, Cut dan Darwanis. 2012. Pengaruh Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan dan Kompetensi terhadap Kinerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (studi pada Inspektorat Aceh). ISSN 2302-0164 Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 2 Nomor 1. Hal 15-27.
- Hajar, Nuzul Ibnu. 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara. Skripsi: Halu Oleo.
- OECD. 2016. OECD Kajian Open Government Indonesia hal-hal Pokok 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Permana, Imam Arif. 2015. Pengaruh Partisipasi Publik dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan). Artikel Ilmiah: Universitas Negeri Padang.
- Pusat Bahasa. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putra, Hendra G. 2014. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Studi Empiris pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat). Artikel Ilmiah: Universitas Negeri Padang.
- Saputra, Devi Satria dan Darwanis. 2014. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi pada Pemda Kabupaten Aceh Selatan). ISSN 2302-0164 Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 3 Nomor 2. Hal 76-84.
- Situs resmi BPK. <http://www.bengkulu.bpk.go.id>. Diakses pada 3 November 2017.
- Turner, M., dan David Hulme. 1997. Governance, Administration, and Development. London: MacMillan Press.
- Yusnaena dan Syahril. 2013. Pengaruh Integritas Terhadap Kinerja Karyawan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. ISSN 1693-2617 Jurnal Menara Ilmu Volume 9 Nomor 42. Hal 186-191.